Policy Brief

# KRISIS KAPASITAS PENGELOLAAN SAMPAH DAN URGENSI TRANSISI KE SISTEM SANITARY LANDFILL DI KABUPATEN BENER MERIAH

Disusun Oleh : Firlyadi

## Ringkasan Eksekutif

Kabupaten Bener Meriah menghadapi krisis pengelolaan sampah akibat peningkatan volume timbulan sampah yang mencapai 25.117,3 ton pada tahun 2024, meningkat dari 24.084,7 ton di tahun 2022. Masalah utama adalah meningkatnya volume sampah setiap tahun yang berdampak pada kelebihan kapasitas TPA Uber-Uber di Desa Perumpakan Benjadi yang diproyeksikan mencapai *over capacity* pada tahun 2025. Akar masalah terletak pada tiga faktor: pertumbuhan populasi dan ekonomi, rendahnya efektivitas program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang hanya 0,44% pada 2024, dan keterbatasan infrastruktur TPA. Dampak negatif meliputi krisis kapasitas TPA, risiko kesehatan masyarakat, serta polusi udara dan air. Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan transisi menuju sistem sanitary landfill, penguatan regulasi 3R melalui Perbup pemilahan wajib dan aktivasi Bank Sampah, serta peningkatan kapasitas anggaran untuk operasional TPA dan pelatihan SDM.

## Rekomendasi Kebijakan

- **Transisi Sanitary Landfill**
  Wajib menghentikan Open Dumping dan mengimplementasikan sistem yang ramah lingkungan.
- **Penguatan Regulasi 3R**
  Menerbitkan Perbup pemilahan wajib dan mengaktifkan Bank Sampah desa.
- **Peningkatan Kapasitas Anggaran**
  Alokasi dana khusus untuk operasional IPL, material penutup, dan pelatihan SDM TPA.

| Indikator Kinerja Pengelolaan Sampah Kab. Bener Meriah(SIPSN) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Timbulan Sampah Tahunan (Ton) | 24.084,7 | 24.685,7 | 25.117,3 |
| % Sampah Terkelola | 39.08% | 42.96% | 58.42% |
| % Pengurangan Sampah | 0.07% | 4.61% | 0.44% |

Sumber : Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

| Tahun | Timbulan Sampah Tahunan (Ton) |
|---|---|
| 2022 | 24.084,74 |
| 2023 | 24.685,68 |
| 2024 | 25.117,26 |

Sumber : Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bener Meriah saat ini berada pada titik kritis. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya volume sampah setiap tahun yang menimbulkan dampak pada luasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Uber-Uber di Desa Perumpakan Benjadi. Timbulan sampah yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur yang memadai, terutama pada fasilitas TPA.

Analisis data SIPSN menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan persentase sampah terkelola, volume timbulan sampah terus meningkat yang mencapai 25.117,3 Ton pada tahun 2024. Kondisi ini diperparah dengan dominasi sampah rumah tangga dan keterbatasan armada pengangkut. Hal ini akan menimbulkan dampak sangat serius, yang meliputi kelebihan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), risiko kesehatan masyarakat, serta polusi udara dan air.

Akar masalah ini terletak pada rendahnya efektivitas program Pengurangan Sampah (3R: *Reduce, Reuse, Recycle*) di sumber, yang hanya mencapai 0,44% pada tahun 2024. Hal ini membuat TPA menerima hampir 100% total timbulan sampah, sehingga mempercepat kelebihan kapasitas dan menciptakan krisis lingkungan yang parah.

## MASALAH DAN URGENSI KEBIJAKAN

Pengelolaan sampah di Kabupaten Bener Meriah saat ini berada pada titik kritis. Timbulan sampah yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur yang memadai, terutama pada fasilitas TPA. Meskipun persentase sampah terkelola menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 (58,42%), volume timbulan sampah terus bertambah. Lebih lanjut, persentase pengurangan sampah masih sangat fluktuatif dan rendah (hanya 0,44% pada 2024), mengindikasikan bahwa upaya 3R di tingkat sumber belum berjalan konsisten dan efektif. Krisis ini menuntut reformasi total dalam sistem pengelolaan sampah daerah. Jika tidak ditangani, dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat akan terus memburuk.

> **Berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Aceh 2025–2034 yang disusun oleh BPIW Kementerian PUPR, TPA Perumpakan Benjadi di Kabupaten Bener Meriah diproyeksikan mengalami over capacity pada tahun 2025**, sehingga diperlukan penambahan kapasitas TPA pada tahun 2024 dan 2025 di Kabupaten Bener Meriah.

Temuan ini menegaskan urgensi percepatan transisi sistem pengelolaan sampah menuju *sanitary landfill* yang lebih berkelanjutan.

| Indikator Kinerja Pengelolaan Sampah Kab. Bener Meriah(SIPSN) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Timbulan Sampah Tahunan (Ton) | 24.084,7 | 24.685,7 | 25.117,3 |
| % Sampah Terkelola | 39.08% | 42.96% | 58.42% |
| % Pengurangan Sampah | 0.07% | 4.61% | 0.44% |

Sumber : Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

### Faktor Penyebab Masalah

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bener Meriah bersifat multidimensi, berakar pada tiga faktor utama:

1. **Pertumbuhan Populasi dan Ekonomi**

   Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi secara linier meningkatkan konsumsi dan timbulan sampah harian. Pertumbuhan ini menjadi pendorong utama volume sampah yang masuk ke TPA.

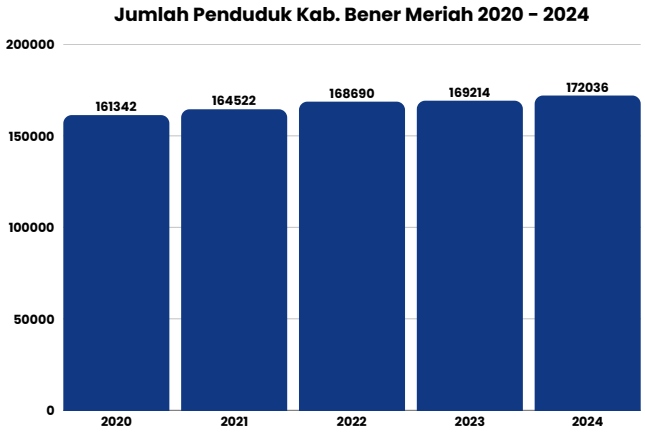


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bener Meriah

### 2 Rendahnya Efektivitas Program Pengurangan Sampah (3R)

Data SIPSN menunjukkan bahwa persentase pengurangan sampah masih sangat rendah dan tidak stabil (tertinggi 4,61% pada 2023 dan turun drastis menjadi 0,44% pada 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa program pemilahan, daur ulang (3R: *Reduce, Reuse, Recycle*), dan Bank Sampah di tingkat sumber belum berjalan konsisten dan efektif. Akibatnya, hampir seluruh sampah langsung berakhir di TPA, sehingga mempercepat krisis kapasitas.

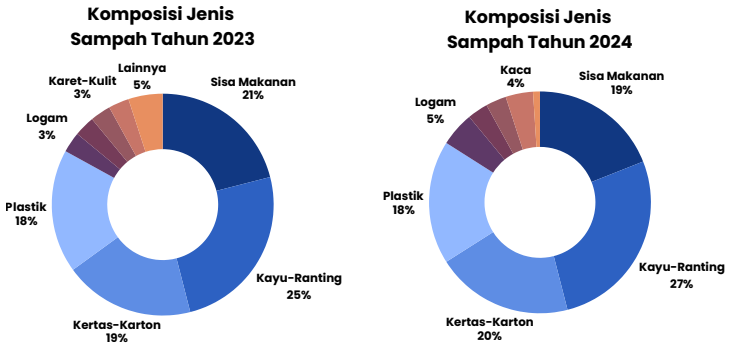


Sumber : Website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

### 3 Keterbatasan Infrastruktur dan Standar Operasional TPA

Terdapat kesenjangan antara kebijakan *existing* dengan realitas lapangan. Keterbatasan armada pengangkut sampah menghambat proses pengumpulan. Lebih krusial lagi, jika TPA masih menggunakan sistem *open dumping* atau *controlled landfill*, peningkatan volume sampah akan secara cepat memicu krisis kapasitas TPA. Standar operasional TPA yang rendah juga meningkatkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan.

## AGENDA KEBIJAKAN YANG DIREKOMEDASIKAN

Rekomendasi kebijakan ini ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, untuk melakukan intervensi yang mendesak dan transformatif.

### 1 Transisi Sistem *Sanitary Landfill*

Transisi menuju sistem *Sanitary Landfill* merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus memperpanjang umur operasionalnya. Pemerintah perlu menetapkan peralihan wajib dari metode *open dumping* atau *controlled landfill* ke sistem *Sanitary Landfill* yang lebih ramah lingkungan, disertai dengan pembangunan fasilitas pengolahan lindi guna mencegah pencemaran air tanah dan permukaan.

Selain itu, penerapan penutupan harian (*daily cover*) harus menjadi standar operasional untuk mengurangi bau, serangga, dan risiko kebakaran. Implementasi menyeluruh sistem ini akan menjamin pengelolaan TPA yang memenuhi standar lingkungan dan mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Rekomendasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan RPIW Aceh 2025 - 2034 yang memproyeksikan TPA Perumpakan Benjadi akan mencapai kapasitas maksimum pada tahun 2025, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan sistem pengelolaan yang lebih modern.

### 2 Penguatan Program Pengurangan Sampah dari Sumber

Pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA perlu dilakukan melalui implementasi masif program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), mengingat capaian pengurangan sampah berdasarkan data nasional yang masih sangat rendah, yakni hanya 0,44% pada tahun 2024. Upaya ini harus dimulai dengan penerapan regulasi pemilahan wajib di tingkat rumah tangga dan institusi melalui peraturan daerah yang tegas. Selain itu, pembangunan dan aktivasi Bank Sampah di setiap desa atau kecamatan perlu diperkuat sebagai pusat pengumpulan dan pengolahan sampah bernilai ekonomi. Langkah ini harus diiringi dengan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya prinsip 3R dan dampak negatif pengelolaan sampah yang tidak tepat. Penguatan aspek edukasi ini berperan penting dalam membentuk perilaku masyarakat yang ramah lingkungan, konsisten, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong munculnya peluang ekonomi berkelanjutan dari aktivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

### 3 Peningkatan Kapasitas Operasional dan Anggaran

Dukungan operasional dan anggaran yang memadai menjadi faktor kunci dalam menjamin keberhasilan transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan alokasi anggaran infrastruktur yang cukup untuk menambah armada pengangkut sampah dan alat berat di TPA agar proses operasional berjalan optimal. Selain itu, pelatihan profesional bagi petugas TPA dan pengelola Bank Sampah harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi kerja. Di sisi lain, integrasi prinsip ekonomi berkelanjutan perlu dikembangkan dengan memanfaatkan peluang ekonomi dari sektor pengelolaan sampah, seperti penciptaan lapangan kerja bagi pemulung, agar mereka dapat berperan dalam sistem formal secara produktif dan berkelanjutan.

## Referensi


- Adyatama, B., Utami, A. S., & Matindas, K. (2025). The environmental impact of landfill expansion in Ijobalit Village, East Lombok Regency. Jurnal Biologi Tropis, 25(3), 4168–4176.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024). Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Aceh Tahun 2025–2034. Kementerian PUPR.
- Data Capaian SIPSN Kabupaten Bener Meriah (2022-2024)
- Data Jumlah Penduduk, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah
- Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. (2024, September 13). Lima kecamatan di Kabupaten Bener Meriah produksi sampah 50 ton per hari. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
- Selvia, S. I., Iemaniiah, Z. M., Sukma Dewi, R. A., Maftuh, M., Akbar, S., & Siddiqirly, M. (2023). Estimasi kapasitas daya tampung landfill dan umur pakai TPA Gili Trawangan. Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan, 9(4), 637–648.
- Vaverkova, M. D. (2019). Landfill impacts on the environment-Review. Geosciences, 9(10), 431.


**"Reformasi pengelolaan sampah bukan pilihan, melainkan keharusan untuk masa depan Bener Meriah yang sehat dan berkelanjutan."**